

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi suatu daerah atau suatu negara pada dasarnya merupakan interaksi dari berbagai kelompok variabel antara sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, teknologi dan lain-lain. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi tidak lepas dari peran manusia dalam mengelolanya, di mana manusia merupakan tenaga kerja, input pembangunan, juga merupakan konsumen hasil pembangunan itu sendiri (Pangastuti, 2015). Kesempatan kerja merupakan salah satu indikator pembangunan ekonomi. Apabila kesempatan kerja tinggi, maka pengangguran akan rendah, yang akan berdampak pada naiknya pertumbuhan ekonomi.

Beberapa faktor utama yang menjadi hambatan penyerapan tenaga kerja di Indonesia yaitu kurangnya tenaga kerja terdidik, infrastruktur yang buruk, dan kerangka kebijakan yang berbelit-belit (Soleh, 2017). Pada tahun 2020, jumlah angkatan kerja di Jawa Tengah mengalami kenaikan. Dilihat dari tempat tinggalnya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di perkotaan cenderung lebih tinggi dibanding TPT di perdesaan. Dari tingkat pendidikan, TPT untuk lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) paling tinggi di antara tingkat pendidikan lain, sementara penduduk yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja sehingga mereka dapat terserap oleh lapangan pekerjaan (Bank Indonesia, 2021). Jumlah angkatan kerja Provinsi Jawa Tengah ditampilkan pada Tabel 1.1.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2020 (Jiwa)**

| <b>Tahun</b> | <b>Bekerja</b> | <b>Pengangguran</b> | <b>Jumlah Angkatan Kerja</b> |
|--------------|----------------|---------------------|------------------------------|
| 2014         | 16.550.682     | 996.344             | 17.547.026                   |
| 2015         | 16.435.142     | 863.783             | 17.298.925                   |
| 2017         | 17.186.674     | 823.938             | 18.010.612                   |
| 2018         | 17.413.869     | 815.083             | 18.228.952                   |
| 2019         | 17.602.917     | 818.276             | 18.421.193                   |
| 2020         | 17.536.935     | 1.214.342           | 18.751.277                   |

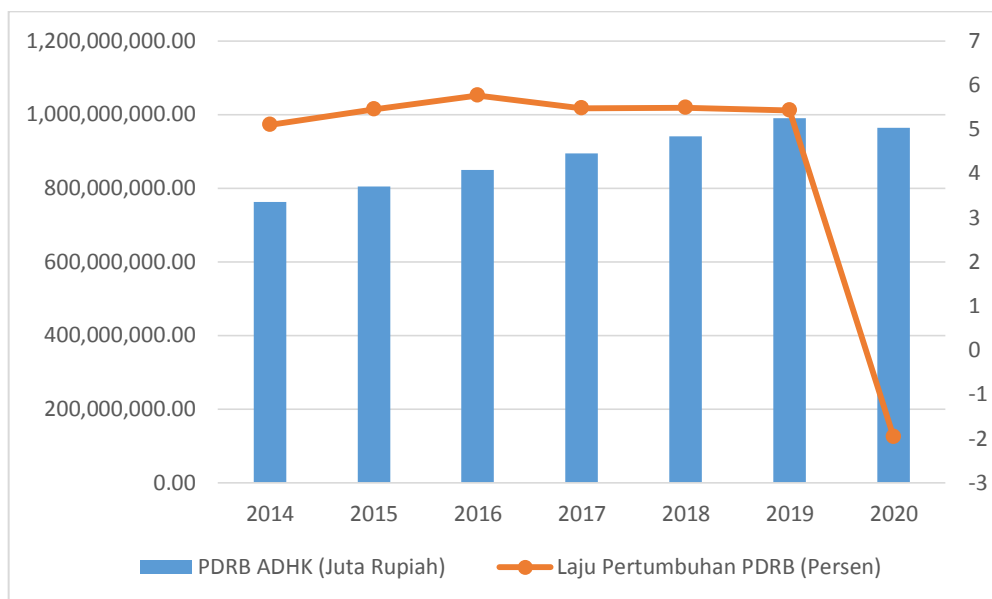
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, data diolah

Tabel 1.1 menunjukkan jumlah penduduk bekerja, jumlah pengangguran terbuka, dan jumlah angkatan kerja di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 sampai tahun 2020. Pada tahun 2020, Jawa Tengah memiliki modal yang besar dalam hal sumber daya manusia, di mana jumlah penduduk usia kerja meningkat dari tahun sebelumnya. Namun, pandemi *Covid-19* membuat banyak penduduk di Jawa Tengah kehilangan pekerjaan sehingga pengangguran meningkat drastis. Penurunan permintaan di tingkat domestik dan global membuat aktivitas produksi melemah, sehingga beberapa pelaku usaha mengurangi jumlah tenaga kerja (Bank Indonesia, 2021).

Salah satu variabel yang memengaruhi permintaan tenaga kerja di Jawa Tengah yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB didefinisikan sebagai nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian selama kurun waktu tertentu, dan juga sering digunakan sebagai ukuran pendapatan nasional atau regional. Menurut Mankiw (2006), semakin tinggi pendapatan, semakin besar konsumsi, sehingga permintaan akan barang dan jasa meningkat. Produsen akan terdorong untuk menambah produksinya, dan

kemudian akan membutuhkan tenaga kerja tambahan. Nilai PDRB dan laju pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah ditunjukkan pada Grafik 1.1.

**Grafik 1.1**  
**PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Laju Pertumbuhannya di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2020**

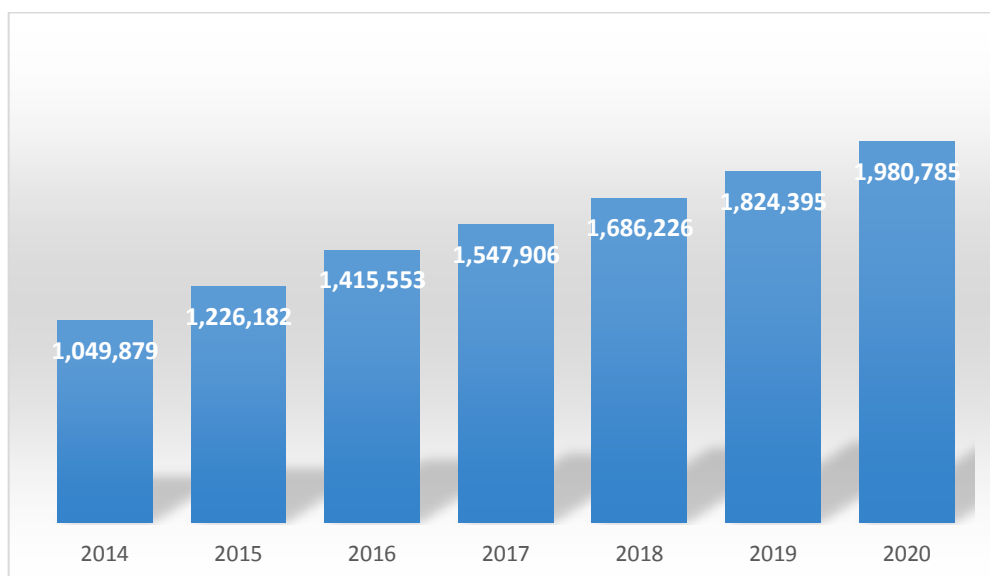


Sumber: BPS Jawa Tengah, data diolah

Grafik 1.1 menunjukkan bahwa PDRB dan laju pertumbuhan PDRB mengalami penurunan pada tahun 2020. Hal tersebut disebabkan karena menurunnya konsumsi rumah tangga akibat pandemi *Covid-19*. Berdasarkan komponennya, konsumsi rumah tangga di Jawa Tengah didominasi oleh pengeluaran dalam bentuk makanan dan minuman, transportasi dan komunikasi, serta perumahan dan perlengkapan rumah tangga. Pembatasan aktivitas masyarakat serta tingkat kekhawatiran yang tinggi terhadap penyebaran *Covid-19* membuat konsumsi masyarakat menjadi lebih rendah dibanding tahun 2019 (Bank Indonesia, 2021).

Selain PDRB, upah juga mempunyai pengaruh terhadap permintaan tenaga kerja. Menurut Ehrenberg & Smith (2012), mempekerjakan satu unit tambahan baik tenaga kerja maupun modal akan menghasilkan pendapatan tambahan bagi perusahaan, karena output yang diproduksi dan dijual akan bertambah. Perusahaan akan meningkatkan permintaan tenaga kerja selama pendapatan lebih besar dari biaya. Sebaliknya, perusahaan akan mengurangi penggunaan tenaga kerja selama biaya yang dikeluarkan lebih besar dari pendapatannya. Maka, upah mempunyai pengaruh negatif terhadap permintaan tenaga kerja. Rata-rata Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah ditunjukkan pada Grafik 1.2.

**Grafik 1.2**  
**Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2020 (Rupiah)**



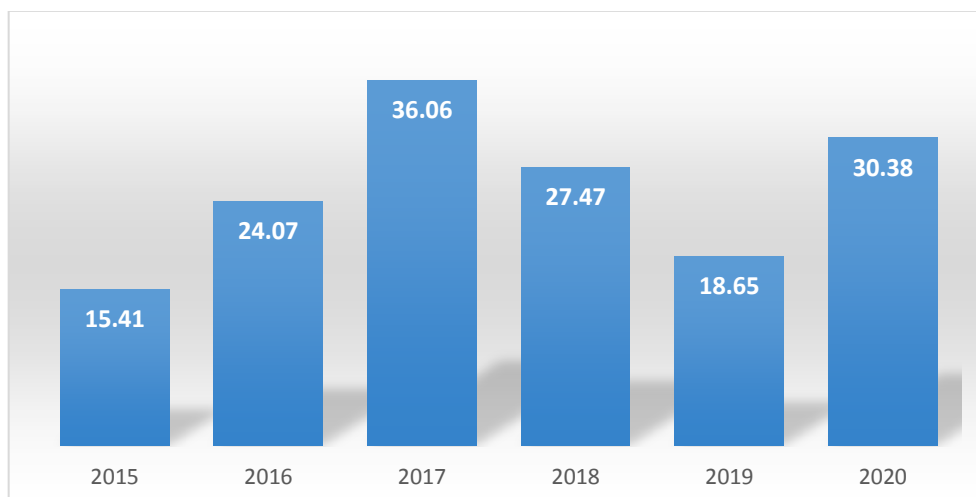
Sumber: BPS Jawa Tengah, data diolah

Grafik 1.2 menunjukkan bahwa rata-rata UMP Jawa Tengah selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penetapan kebijakan upah minimum ditujukan untuk meningkatkan upah para pekerja yang masih berpendapatan di

bawah upah minimum. Hal ini disebabkan karena pada pasar tenaga kerja di Jawa Tengah, rata-rata upah di perkotaan masih lebih tinggi dibandingkan dengan upah di perdesaan (Susilowati & Wahyuni, 2019).

Faktor selanjutnya yang juga memengaruhi permintaan tenaga kerja adalah investasi. Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, serta meningkatkan pendapatan nasional dan taraf kemakmuran (Hermawan, Indrawati, & Sarfiah, 2019). Adanya investasi akan mendorong terciptanya barang modal baru sehingga kesempatan kerja baru akan banyak tercipta, dan angka pengangguran dapat ditekan (Sandika, Maulida, & Setiawan, 2014). Nilai investasi PMDN Provinsi Jawa Tengah ditunjukkan dalam Grafik 1.3.

**Grafik 1.3**  
**Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Jawa Tengah (Triliun Rupiah)**



Sumber: *National Single Window for Investment (NSWI)*, data diolah

Grafik 1.3 menunjukkan total investasi PMDN Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 sampai tahun 2020 yang mengalami fluktuasi. Investasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan nilai 36,06 triliun rupiah dan terendah pada tahun

2015 dengan nilai 15,41 triliun rupiah. Perkembangan perekonomian daerah tidak lepas dari peran investasi yang ditanamkan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut memerlukan penghimpunan dana atau investasi, baik dari pemerintah maupun swasta yang diarahkan pada kegiatan ekonomi produktif sehingga dapat meningkatkan permintaan tenaga kerja (Sandika, Maulida, & Setiawan, 2014).

### **B. Rumusan Masalah**

Pembangunan ekonomi tidak lepas dari peran manusia dalam mengelolanya. Apabila kesempatan kerja tinggi, maka pengangguran akan rendah, yang berdampak pada naiknya pertumbuhan ekonomi. PDRB merupakan salah satu faktor yang memengaruhi permintaan tenaga kerja, karena kenaikan PDRB akan mendorong produsen untuk meningkatkan produksi, sehingga permintaan tenaga kerja juga ikut naik.

Upah yang merupakan biaya produksi juga berpengaruh terhadap permintaan tenaga kerja. Dengan menambah tenaga kerja, upah yang harus dibayarkan oleh perusahaan akan meningkat pula. Lalu, kegiatan investasi juga memungkinkan masyarakat untuk terus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperlukan penelitian yang membahas tentang pengaruh PDRB, UMK, dan investasi terhadap permintaan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengestimasi pengaruh Produk Domestik Regional Buto (PDRB), Upah

Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan investasi terhadap permintaan tenaga kerja di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2020.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengestimasi pengaruh PDRB, UMK, dan investasi terhadap permintaan tenaga kerja di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2020.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan positif untuk membuat kebijakan terkait masalah ketenagakerjaan.

Bagi kalangan akademisi, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi semua pihak yang melakukan penelitian, khususnya terkait dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini disajikan dalam lima bab, yaitu:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan landasan teori dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permintaan tenaga kerja, PDRB, UMK, dan investasi. Di akhir bab ini akan dirumuskan hipotesis penelitian berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan model penelitian dan metode analisis, terutama analisis regresi data panel untuk mencapai tujuan penelitian. Di akhir bab akan ditampilkan definisi operasional variabel penelitian dan sumber data.

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil analisis data, interpretasi hasil regresi dan interpretasi ekonomi.

### BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil pengolahan data penelitian dan juga berisi saran yang berguna untuk pihak-pihak yang bersangkutan.

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN